

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hal mendukung penelitian ini, peneliti tentunya menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dan acuan untuk bahan perbandingan. Adapun hasil penelitian terdahulu peneliti cantumkan sebagai berikut:

1. **Agung Lin Setiono, 2024. “Problem Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan Sampah di TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) Desa Buniwah Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes”. Fakultas Dakwah, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah produksi sampah di Desa Buniwah yang mencapai 15 ton per bulan, meskipun desa tersebut telah memiliki TPS 3R sebagai solusi pengelolaan sampah. tujuan penelitian adalah mendeskripsikan problem pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah di TPS 3R serta menemukan solusi untuk mengatasinya. teori yang digunakan antara lain teori Pemberdayaan Masyarakat, Teori Partisipasi, dan Teori Problem Solving. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). hasil penelitian menunjukkan adanya tiga problem utama dalam pemberdayaan masyarakat

di TPS3R Desa Buniwah, yaitu: (1) masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, (2) kurangnya partisipasi masyarakat, dan (3) rendahnya gaji atau insentif bagi pekerja TPS3R.

2. **M. Kamarrudin, 2023. “Implementasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R Berkah Sebumi Pada Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara”.** Program Studi Administrasi Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Pengelolaan Tempat Sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R Berkah Sebumi Pada Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori yang digunakan pada penelitian ini Adalah teori Implementasi menurut George C. Edward III (Agustino, 2019:136-141). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan implementasi Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R Berkah Sebumi Pada Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara terimplementasi dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi dua Pertama faktor pendukung: adanya sosialisasi dalam penanggulangan dan pemanfaatan sampah. Kedua, faktor penghambat meliputi: terbatasnya anggaran menyebabkan sarana prasarana tidak memadai, pemberian fasilitas tidak merata di setiap RT serta sering terjadi keterlambatan petugas dalam mengangkut sampah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan hal yang mendasar yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap individu. Kegiatan partisipasi adalah wujud keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi, dan perasaan.

Menurut Histiraludin dalam Handayani dalam Aulia (2018 : 13) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”.

Menurut Keit Davis dan John W. Nestrom dalam Hamid (2018:148) Definisi partisipasi tersebut mengandung beberapa unsur yaitu:

- 1) Adanya keterlibatan mental dan emosi, ini mengandung arti bahwa aspek mental-emosional yang mencerminkan faktor psikologis lebih menonjol dari pada aktivitas secara fisik dalam menyelesaikan tugas yang dilakukannya.
- 2) Adanya dorongan dalam diri seseorang (motivasi) untuk mau memberi sumbangan (kontribusi) baik berupa pikiran, tenaga, dana dan waktu. Di sini setiap individu diberikan peluang untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitasnya bagi kepentingan kelompok. Jadi partisipasi yang tumbuh bukan hanya sekedar kesepakatan antara gagasan manajer dengan penerapan oleh anggota kelompoknya, tetapi lebih dari hal tersebut. Mekanisme yang terjadi telah mewujudkan adanya pertukaran sosial dua arah diantara mereka yang terlibat dalam kelompok tersebut, termasuk antara manajer dan anggotanya.
- 3) Adanya kesediaan untuk bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang diikutinya. Kondisi yang terjadi Adalah, adanya

kebersamaan secara spontan dari diri masing-masing anggota yang terlibat untuk mewujudkan kebutuhan bersama. Tumbuhnya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki merupakan pencerminan terhadap kerja yang dilakukannya, sehingga mencapai keberhasilan yang optimal. Dalam kondisi ini, maka para anggota kelompok memandang pimpinannya sebagai kontributor yang suportif bagi mereka.

Lebih lanjut di kemukakan bahwa secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (*intrinsik*) maupun dari luar diri seseorang (*ekstrinsik*)

Menurut Mansuri dan Rao (2018), partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

- 1) Partisipasi informatif: Masyarakat hanya diberikan informasi tentang proyek pembangunan tanpa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi konsultatif: Masyarakat diajak untuk memberikan masukan atau pendapat mengenai kebijakan atau proyek pembangunan.
- 3) Partisipasi keputusan: Masyarakat terlibat langsung dalam pembuatan keputusan, baik dalam perencanaan maupun evaluasi.
- 4) Partisipasi eksekusi: Masyarakat tidak hanya terlibat dalam perencanaan dan evaluasi, tetapi juga dalam pelaksanaan proyek pembangunan itu sendiri.

b. Bentuk Partisipasi

Sebagai suatu bentuk keterlibatan dalam suatu isu atau proses tertentu, partisipasi dipahami memiliki jenis yang bervariasi. Dalam hal ini, Brinkerhoff & Crosby dalam Hamdi (2015 : 152) menyatakan lima tipe partisipasi, yang mencakup keberagaman informasi, konsultasi, kolaborasi, pembuatan keputusan bersama,

dan pemberdayaan. menurut Dessldrop dalam Theresia dkk (2015 :200) mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi masyarakat berupa:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok .
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat.
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- 6) Memamfaatkan hasil-hasil yang di capai dari kegiatan masyarakat.

c. Tingkat Partisipasi

Menurut Sumarto dalam Nafurbenan dkk (2022:25) mengelompokkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Tinggi
 - a) Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan.
 - b) Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan
- 2) Sedang
 - a) Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi golongan tertentu
 - b) Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian
- 3) Rendah
 - a) Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah
 - b) Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja.

- c) Masyarakat masih sangat bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulan akan terhenti juga.

Sementara Menurut Subandi (2022:7) mengutip pendapat wilcox menyebutkan ada lima tingkatan partisipasi masyarakat. Kelima tingkatan tersebut adalah sebagai berikut yaitu:

- 1) Memberi informasi (*information*). Ini merupakan bentuk partisipasi paling rendah karena masyarakat hanya memberikan informasi yang mereka nilai dibitihkan oleh organisasi.
- 2) Konsultasi (*consultation*) yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- 3) Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*). Partisipasi ini dilakukan dengan cara memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan pilihan, serta mengembangkan peluang yang diperlukan untuk pengambilan keputusan organisasi.
- 4) Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekadar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya
- 5) Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*). Dalam peran ini, kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasihat, dukungan lain untuk pengembangan agenda kegiatan.

d. Variabel Penting dalam Partisipasi

Menurut Ngusmanto (2015:140-147) ada 2 (dua) faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi partisipasi seseorang atau sekelompok atau suatu masyarakat dalam kegiatan atau aktivitas bersama. Faktor-faktor tersebut ialah faktor eksternal dan faktor internal.

1) Faktor Eskternal

a) Aktor penggerak

Partisipasi yang tumbuh karena digerakkan oleh orang lain lebih mendominasi atau jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang tumbuh karena kesadaran.

b) Wahana yang tersedia

Wahana dalam hal ini bermakna seberapa besar peluang atau kesempatan yang tersedia bagi warga untuk berpartisipasi.

c) Sumber dana kegiatan

Partisipasi masyarakat akan menjadi aktif dan positif apabila sumber dana berasal dari swadaya masyarakat.

d) Pemilik kegiatan

Apabila pemilik kegiatan masyarakat maka partisipasi masyarakat akan mudah ditumbuhkan.

e) Manfaat langsung

Warga masyarakat yang mendapat manfaat langsung akan mudah disentuh untuk berpartisipasi, sehingga hasil-hasil pembangunan akan lebih terpelihara karena masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki.

2) Faktor Internal

a) Tingkat ekonomi

semakin tercukupi kebutuhan warga secara ekonomi, semakin mudah ia digerakkan dan sebaliknya.

b) Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi status sosial seseorang. Orang yang memiliki status sosial tinggi akan merasa malu apabila ia tidak aktif berpartisipasi dalam aktivitas bersama.

c) Tingkat pemahaman

Semakin tahu dan paham terhadap aktivitas bersama, makin mudah seseorang digerakkan untuk berpartisipasi.

d) Tingkat kepedulian

Orang yang memiliki kepedulian terlihat dari perhatiannya, mau tahu, mau berbuat dan berkorban untuk orang lain atau aktivitas bersama dan kepentingan publik.

- e) Rasa ego
Makin tinggi ego seseorang, makin sulit untuk berpartisipasi dan makin besar jumlah mereka, makin sulit digerakkan untuk berpartisipasi.
- f) Rasa memiliki
Seseorang yang telah tumbuh rasa memiliki, secara otomatis akan dibarengi tumbuhnya rasa tanggung jawab, rasa cinta dan siap berkorban, termasuk akan berperan aktif dan positif.
- g) Jenis kelamin
pengaruh jenis kelamin dalam partisipasi perlu memperhatikan jenis kegiatan bersama yang mau dikaji.
- h) Tingkat umur
Pengaruh tingkat umur terhadap partisipasi dalam aktivitas bersama harus memperhatikan pula jenis kegiatan bersama.

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat dalam Diandra (2021:42) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Roucek dan Waren dalam Diandra (2021;42) memberikan pendapat yang berbeda. Menurut mereka, masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama, berdiam (bertempat tinggal) dalam daerah yang sama, dan sebagian besar atau seluruh warga-nya memperlihatkan adanya adat kebiasaan serta aktivitas yang sama.

Suatu masyarakat tidak terjadi begitu saja. Sebelum menjadi masyarakat, terlebih dahulu harus diawali dengan adanya sekelompok manusia yang banyak, yang telah mempunyai tempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu lama dan memiliki

aturan-aturan yang mengatur kepentingan bersama. Setelah terdapat hal-hal tersebut, barulah terbentuk suatu masyarakat.

b. Faktor-faktor terbentuknya Masyarakat

Menurut Diandra (2021:43-44) suatu masyarakat tidak terjadi begitu saja. Sebelum menjadi masyarakat, terlebih dahulu harus diawali dengan adanya sekelompok manusia yang banyak, yang telah mempunyai tempat tinggal di suatu daerah tertentu dalam waktu lama dan memiliki aturan-aturan yang mengatur kepentingan bersama.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya suatu masyarakat, antara lain:

- 1) Keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar biologis, seperti sandang, pangan, dan papan;
- 2) Keinginan untuk bersatu dengan manusia lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup;
- 3) Keinginan untuk bersatu dengan lingkungan hidup;
- 4) Keinginan untuk mengembangkan keturunan melalui keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil; dan
- 5) Kecenderungan sosial manusia, yaitu seluruh tingkah lakunya yang berkembang melalui interaksi sosial dengan sesama manusia.

Jadi, masyarakat timbul dari kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Hal ini senada dengan pendapat Linton yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang penting dalam pembentukan masyarakat dari kelompok individu adalah waktu. Waktu inilah yang memberikan kesempatan kepada individu-individu untuk bekerja sama dan mengemukakan pola-pola tingkah laku dan sikap yang bersifat timbal balik, serta menemukan teknik-teknik hidup bersama.

Dengan adanya waktu yang cukup lama, timbullah syarat-syarat yang perlu dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat, yaitu adanya proses adaptasi dan organisasi perilaku para anggota kelompok, sehingga timbullah kesadaran berkelompok. Selain itu, terdapat beberapa unsur yang bisa mengikat satu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat, yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan tersebut, adat istiadat, norma-norma, hukum, aturan-aturan yang khas dan adanya suatu rasa identitas di antara para warga atau anggotanya bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lain.

3. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Theresia dkk (2015:197) Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya,

Menurut Hamdi (2015:150-151) Partisipasi masyarakat merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikembangkan dan

pengembangannya memerlukan waktu, sumber daya, pemahaman dan ketekunan. Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat secara sukarela, selain juga merupakan gambaran dari pengungkapan dan pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan pernyataan tersebut, partisipasi dapat dipahami sebagai suatu proses melalui mana masyarakat mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap inisiatif pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, termasuk berbagi kontrol terhadap sumber daya yang mempengaruhi mereka. Masyarakat hanya akan berpartisipasi ketika mereka merasa mengetahui tujuan yang akan dicapai serta tolok ukur keberhasilan yang mereka nilai bermanfaat untuk kehidupan mereka. Di samping itu, partisipasi selalu dikembangkan sebagai pencerminan kesukarelaan, sehingga sekali kesepakatan tercapai, dapat diharapkan adanya kemauan yang kuat dan konsisten untuk melaksanakannya.

b. Faktor-faktor penghambat Partisipasi Masyarakat

Menurut Dwiningrum dalam Hutagalung (2022:15) faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

- 1) Sifat malas, apatis, masa bodo, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.
- 2) Aspek-aspek tipologis.
- 3) Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya).
- 4) Demografis (jumlah penduduk).
- 5) Ekonomi (desa miskin/tertinggal).

Sementara Solekhan dalam Hutagalung (2022:16) mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

1) Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat.

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil.

2) Melemahnya Modal Sosial.

Modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Soetrisno dalam Theresia dkk (2015:211) mengidentifikasi beberapa masalah kaitannya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- 1) Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Masalah kedua adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

c. Syarat tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Theresia dkk (2015:206) Pemberdayaan, pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mereka mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian, ekonomi, sosial, fisik maupun mental. Meskipun partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan dalam proses pembangunan, namun di dalam praktiknya, tidak selalu diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Sedangkan Menurut Suyono dalam Hutagalung (2022:22) Paling tidak ada tiga syarat dalam proses tumbuhnya pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Kesadaran, kejelasan serta pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan.
- 2) Pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak termasuk masyarakat tentang hal-hal apa, di mana, dan siapa yang akan diberdayakan.
- 3) Adanya kemauan dan keterampilan kelompok sasaran untuk menempuh proses pemberdayaan.

Selanjutnya Slamet dalam Sri Handini (2019:3-7) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu ;

- 1) Adanya kesepakatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

4. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah seperti yang dikatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Sampah, dikatakan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

b. Pengertian Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganannya dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah,

pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

Sri Bebasari dari Indonesian Waste Forum (IWF) dalam Yudianto dkk (2019:10-11) mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah sampah dapat dilakukan dengan melihat 5 (lima) aspek yang melingkupi aspek hukum, institusi, pendanaan, peran serta masyarakat dan teknologi yang membalut.

- 1) Aspek Hukum.
Kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah kita adalah tidak ada kebijakan secara nasional yang berakibat pada tidak menentunya peraturan daerah dalam menentukan pijakan hukumnya.
- 2) Aspek Institusi.
Permasalahan sampah menjadi berlarut-larut lantaran tidak adanya Badan Khusus yang menangani masalah ini secara khusus.
- 3) Aspek Pendanaan.
Hingga kini masyarakat masih menganggap sampah hanya merupakan barang buangan padahal kalau dapat merubah pandangan ini dapat menjadikan sampah sebagai investasi yang bisa mendatangkan keuntungan, maka niscaya seluruh permasalahan sampah mudah untuk diatasi.
- 4) Peran Serta Masyarakat.
Kita harus mendorong kesadaran tiap manusia yang ada di Indonesia, bahwa masalah sampah merupakan hasil dari tindakan mereka juga. Jadi tanggung jawab mengenai masalah ini, merupakan tanggung jawab mereka juga.
- 5) Teknologi
Masih minimnya pengkajian teknologi dalam permasalahan sampah ini. Untuk masalah ini, ia menargetkan hingga 25 tahun mendatang paling tidak pengelolaan sampah kita harus sudah dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, industri, pertanian, pasar, perkantoran dan Hotel.

Mengelola sampah sesungguhnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan pemilahan/pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. Misalnya dengan membagi sampah tersebut sampah kering, basah, atau sampah plastik dan botol. Hal ini tentunya memudahkan petugas untuk memberikan perlakuan yang

lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan.

c. Manajemen Pengelolaan Sampah

Menurut Nafurbenan dkk (2022:51-53) Permasalahan sampah merupakan permasalahan serius yang dimiliki bersama-sama karena semua manusia merupakan pihak yang menghasilkan sampah. Sampah menjadi masalah ketika sampah mulai menumpuk dan kuantitasnya tidak dapat dikendalikan. Pengelolaan sampah yang efektif dapat mengurangi jumlah sampah sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, manfaat lain yang diperoleh dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila modal sosial dan tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi.

Namun tingginya partisipasi masyarakat harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang menunjang. Penyediaan tempat sampah, poster edukasi, truk sampah serta pengelolaan sampah berkelanjutan dan ramah lingkungan harus dapat mengakomodir kepentingan permasalahan sampah di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi perbaikan pengelolaan sampah memerlukan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, serta diperlukan adanya upaya pengembangan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pengelolaan yang baik dapat dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengurangi beban pemerintah, terutama untuk pewadahan dan

pengangkutan sampah.

d. Konsep 3R

Menurut Yudianto dkk (2019:11-12) Konsepsi 3R yaitu (1) *reduce*, mendorong kita sebisa mungkin mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, (2) *Reuse* menggunakan kembali barang yang biasa dibuang dengan menghindari barang-barang yang disposable (sekali pakai buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah dan yang ke (3) *recycle* yaitu mendaur ulang. Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal, Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/ mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur berpikir peneliti dalam mengkaji Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Sampah TPS 3R di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Kerangka pemikiran ini berdasar dari landasan normatif, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, serta teori Partisipasi Masyarakat Menurut Slamet dalam Sri Handini (2019:3-7) yaitu:

1. Adanya kesempatan yang di berikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

